

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tahun ini.

Laporan ini merupakan salah satu target kinerja yang harus direalisasikan pada tahun ini, sebagai motivasi untuk memberikan layanan prima yang akuntabel dan transparan serta bebas dari segala bentuk tindak korupsi dan benturan kepentingan dalam pelaksanaannya.

Laporan Monitoring dan Evaluasi ini hendaknya dapat menjadi bahan masukan dalam mengawal dan merupakan upaya meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di BPPSI.

Pekanbaru, 5 Januari 2022

Kepala



Fathullah

LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAWASAN TA.2021

BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 108/I-IND/PER/12/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian dengan maksud untuk dapat menjamin bahwa pelaksanaan pembangunan Zona Integritas sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Laporan ini merupakan kesimpulan akhir dari hasil Monitoring dan Evaluasi bulanan Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan selama Tahun Anggaran 2021 yang telah dilaksanakan BPPSI Pekanbaru. Dalam laporan ini disampaikan beberapa Laporan yaitu :

1. Laporan Benturan Kepentingan Unit Kerja

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama TA. 2021 dapat disimpulkan bahwa *tidak terjadi* Benturan Kepentingan dari Pejabat atau Pegawai di Lingkungan Unit Kerja.

2. Laporan Whistle Blowing System (WBS)

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama TA. 2021 dapat disimpulkan bahwa *tidak terdapat* aduan mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan dan tindakan lain yang sejenis.

3. Laporan Pengaduan Masyarakat

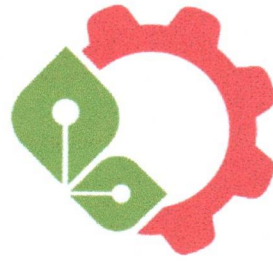
Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama TA. 2021 dapat disimpulkan bahwa *tidak terdapat* Pengaduan Masyarakat seperti : Penyalahgunaan Wewenang, Pelayanan Masyarakat, Indikasi KKN/Pungli, Kepegawaian, Tata Laksana/Regulasi dan pengaduan lainnya.

4. Laporan Pengendalian Gratifikasi

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama TA. 2021 dapat disimpulkan bahwa *tidak terdapat* aduan mengenai Gratifikasi dan tidak terdapat aduan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Tujuan penyusunan laporan ini merupakan bahan evaluasi dalam rangka implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Kami mengharapkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Tahun Anggaran 2021 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak sebagai bahan informasi, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan Zona Integritas BPPSI Pekanbaru dalam upaya peningkatan pelayanan publik secara terus-menerus guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN JANUARI 2021**



**LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN JANUARI 2021**

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) serta peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada bulan Januari Tahun 2021 pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak terjadi Benturan Kepentingan.

Demikian laporan Benturan Kepentingan pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru pada Bulan Januari Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Februari 2021



Kepala BPPSI


Fathullah

**LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN JANUARI 2021**

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian (*Whistle Blowing System*).

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak terdapat aduan mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan Tindakan lain yang sejenis.

Demikian laporan Whistle Blowing System (WBS) pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Januari Tahun 2021. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Februari 2021



Kepala BPSI


Fathullah

**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN JANUARI 2021**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Website, dan Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Januari Tahun 2021 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Januari Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Februari 2021

Kepala BPPSI

Fathullah



**LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN JANUARI 2021**

Dalam rangka peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kami Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru melaporkan hal-hal terkait dengan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. Pada Bulan Januari Tahun 2021 Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak terdapat aduan mengenai gratifikasi.
2. Pada Bulan Januari Tahun 2021 tidak terdapat aduan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

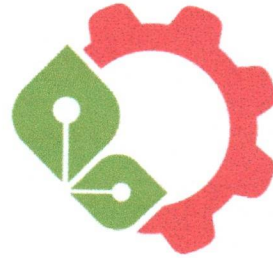
Demikian laporan Pengendalian Gratifikasi yang terjadi pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru pada Bulan Januari Tahun 2021. Laporan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi Pengendalian Gratifikasi dalam rangka implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Februari 2021



Kepala BPPSI


Fathullah



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN FEBRUARI 2021**



**LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN FEBRUARI 2021**

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) serta peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian.


Pada bulan Februari Tahun 2021 pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak terjadi Benturan Kepentingan.

Demikian laporan Benturan Kepentingan pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru pada Bulan Februari Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Maret 2021



Kepala BPPSI


Fathullah

**LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN FEBRUARI 2021**

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian (*Whistle Blowing System*).

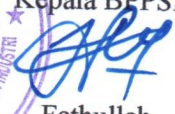
Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak terdapat aduan mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan Tindakan lain yang sejenis.

Demikian laporan Whistle Blowing System (WBS) pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Februari Tahun 2021. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Maret 2021



Kepala BPPSI


Fathullah

**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN FEBRUARI 2021**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru sudah terdapat sarana pengaduan berupa Telepon, Email, Website, dan Kotak Saran yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan.

Selama bulan Februari Tahun 2021 tidak ada pengaduan masyarakat yang masuk melalui sarana pengaduan tersebut diatas.

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama bulan Februari Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Maret 2021



Kepala BPPSI


Fathullah

**LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN FEBRUARI 2021**

Dalam rangka peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kami Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru melaporkan hal-hal terkait dengan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. Pada Bulan Februari Tahun 2021 Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak terdapat aduan mengenai gratifikasi.
2. Pada Bulan Februari Tahun 2021 tidak terdapat aduan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

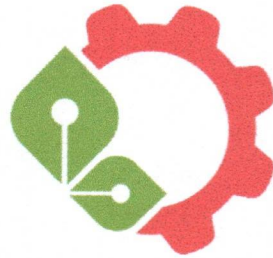
Demikian laporan Pengendalian Gratifikasi yang terjadi pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru pada Bulan Februari Tahun 2021. Laporan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi Pengendalian Gratifikasi dalam rangka implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Maret 2021



Kepala BPPSI

Fathullah
Fathullah



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN MARET 2021**



**LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN MARET 2021**

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) serta peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada bulan **Maret Tahun 2021** pada **Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak terjadi** Benturan Kepentingan pada Unit Kerja.

Demikian laporan Benturan Kepentingan pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru pada Bulan Maret Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, April 2021



Kepala BPPSI

Fathullah

**LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN MARET 2021**

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian (*Whistle Blowing System*).

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak terdapat aduan** mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan Tindakan lain yang sejenis.

Selama Bulan **Maret Tahun 2021**, pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru telah menerima aduan sebanyak **0 aduan**.

Demikian laporan *Whistle Blowing System (WBS)* pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Maret Tahun 2021. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, April 2021

Kepala BPSI

Fathullah



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN MARET 2021**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** terdapat sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui **Website, Telepon, Kotak Saran dan Formulir Pengaduan Masyarakat**.

Selama Bulan **Maret Tahun 2021**, sebanyak **0 pengaduan** masyarakat telah masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut diatas. Sebanyak **0 pengaduan** telah selesai ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Penyalahan Wewenang | : 0 aduan |
| 2. Pelayanan Masyarakat | : 0 aduan |
| 3. Indikasi KKN/Pungli | : 0 aduan |
| 4. Kepegawaian | : 0 aduan |
| 5. Tata Laksana/Regulasi | : 0 aduan |
| 6. Pengaduan Lainnya | : 0 aduan |

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Maret Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, April 2021

Kepala BPPSI


Fathullah



**LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN MARET 2021**

Dalam rangka peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kami Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** melaporkan hal-hal terkait dengan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. Selama Bulan **Maret Tahun 2021** Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** tidak terdapat aduan mengenai gratifikasi.
2. Pada Bulan **Maret Tahun 2021** tidak terdapat aduan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian laporan Pengendalian Gratifikasi yang terjadi pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Maret Tahun 2021. Laporan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi Pengendalian Gratifikasi dalam rangka implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, April 2021

Kepala BPSI

Fathullah





**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN APRIL 2021**



**LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN APRIL 2021**

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) serta peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada bulan **April Tahun 2021** pada **Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** tidak terjadi Benturan Kepentingan pada Unit Kerja.

Demikian laporan Benturan Kepentingan pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru pada Bulan April Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Mei 2021

Kepala BPPSI

Fathullah



**LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN APRIL 2021**

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian (*Whistle Blowing System*).


Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak terdapat aduan** mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan Tindakan lain yang sejenis.

Selama Bulan **April Tahun 2021**, pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru telah menerima aduan sebanyak **0 aduan**.

Demikian laporan *Whistle Blowing System (WBS)* pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan April Tahun 2021. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Mei 2021



Kepala BPPSI

Fathullah

**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN APRIL 2021**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** terdapat sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui **Website, Telepon, Kotak Saran dan Formulir Pengaduan Masyarakat**.

Selama Bulan **April Tahun 2021**, sebanyak **0 pengaduan** masyarakat telah masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut diatas. Sebanyak **0 pengaduan** telah selesai ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Penyalahan Wewenang | : 0 aduan |
| 2. Pelayanan Masyarakat | : 0 aduan |
| 3. Indikasi KKN/Pungli | : 0 aduan |
| 4. Kepegawaian | : 0 aduan |
| 5. Tata Laksana/Regulasi | : 0 aduan |
| 6. Pengaduan Lainnya | : 0 aduan |

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan April Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Mei 2021

Kepala BPPSI


Fathullah



**LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN APRIL 2021**

Dalam rangka peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kami Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** melaporkan hal-hal terkait dengan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. Selama Bulan **April** Tahun **2021** Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** **tidak terdapat aduan** mengenai gratifikasi.
2. Pada Bulan **April** Tahun **2021** **tidak terdapat aduan** yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian laporan Pengendalian Gratifikasi yang terjadi pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan April Tahun 2021. Laporan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi Pengendalian Gratifikasi dalam rangka implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Mei 2021

Kepala BPSI



Fathullah





**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN MEI 2021**



**LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN MEI 2021**

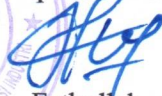
Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) serta peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada bulan **Mei Tahun 2021** pada **Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak terjadi** Benturan Kepentingan pada Unit Kerja.

Demikian laporan Benturan Kepentingan pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru pada Bulan Mei Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Juni 2021

Kepala BPSI


Fathullah



**LAPORAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM* (WBS)
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN MEI 2021**

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian (*Whistle Blowing System*).

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** tidak terdapat aduan mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan Tindakan lain yang sejenis.

Selama Bulan **Mei** Tahun **2021**, pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru telah menerima aduan sebanyak **0 aduan**.

Demikian laporan *Whistle Blowing System* (WBS) pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Mei Tahun 2021. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Juni 2021

Kepala BPSI


Fathullah



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN MEI 2021**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** terdapat sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui **Website, Telepon, Kotak Saran dan Formulir Pengaduan Masyarakat**.

Selama Bulan **Mei Tahun 2021**, sebanyak **0 pengaduan** masyarakat telah masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut diatas. Sebanyak **0 pengaduan** telah selesai ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Penyalahan Wewenang | : 0 aduan |
| 2. Pelayanan Masyarakat | : 0 aduan |
| 3. Indikasi KKN/Pungli | : 0 aduan |
| 4. Kepegawaian | : 0 aduan |
| 5. Tata Laksana/Regulasi | : 0 aduan |
| 6. Pengaduan Lainnya | : 0 aduan |

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Mei Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Juni 2021

Kepala BPPSI


Fathullah



**LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN MEI 2021**

Dalam rangka peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kami Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** melaporkan hal-hal terkait dengan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. Selama Bulan **Mei Tahun 2021** Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** **tidak terdapat aduan** mengenai gratifikasi.
2. Pada Bulan **Mei Tahun 2021** **tidak terdapat aduan** yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

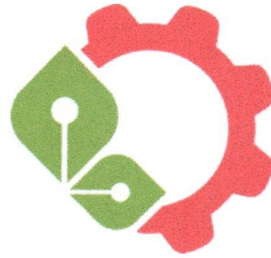
Demikian laporan Pengendalian Gratifikasi yang terjadi pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Mei Tahun 2021. Laporan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi Pengendalian Gratifikasi dalam rangka implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Juni 2021



Kepala BPPSI


Fathullah



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN JUNI 2021**



**LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN JUNI 2021**

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) serta peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada bulan **Juni Tahun 2021** pada **Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak terjadi** Benturan Kepentingan pada Unit Kerja.

Demikian laporan Benturan Kepentingan pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru pada Bulan Juni Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Juli 2021

Kepala BPSI



Fathullah



LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN JUNI 2021

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian (*Whistle Blowing System*).

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak terdapat aduan** mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan Tindakan lain yang sejenis.

Selama Bulan **Juni Tahun 2021**, pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru telah menerima aduan sebanyak **0 aduan**.

Demikian laporan *Whistle Blowing System (WBS)* pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Juni Tahun 2021. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Juli 2021

Kepala BPPSI



Fathullah



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN JUNI 2021**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** terdapat sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui **Website, Telepon, Kotak Saran dan Formulir Pengaduan Masyarakat**.

Selama Bulan **Juni Tahun 2021**, sebanyak **0 pengaduan** masyarakat telah masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut diatas. Sebanyak **0 pengaduan** telah selesai ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

- | | |
|--------------------------|-----------|
| 1. Penyalahan Wewenang | : 0 aduan |
| 2. Pelayanan Masyarakat | : 0 aduan |
| 3. Indikasi KKN/Pungli | : 0 aduan |
| 4. Kepegawaian | : 0 aduan |
| 5. Tata Laksana/Regulasi | : 0 aduan |
| 6. Pengaduan Lainnya | : 0 aduan |

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Juni Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Juli 2021

Kepala BPPSI



Fathullah



**LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN JUNI 2021**

Dalam rangka peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.


Kami Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** melaporkan hal-hal terkait dengan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. Selama Bulan **Juni Tahun 2021** Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** **tidak terdapat aduan** mengenai gratifikasi.
2. Pada Bulan **Juni Tahun 2021** **tidak terdapat aduan** yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian laporan Pengendalian Gratifikasi yang terjadi pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Juni Tahun 2021. Laporan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi Pengendalian Gratifikasi dalam rangka implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

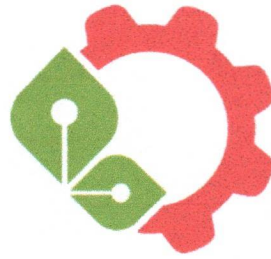
Pekanbaru, Juli 2021

Kepala BPPSI



Fathullah





**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN JULI 2021**



**LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN JULI 2021**

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) serta peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada bulan **Juli Tahun 2021** pada **Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak terjadi** Benturan Kepentingan pada Unit Kerja.

Demikian laporan Benturan Kepentingan pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru pada Bulan Juli Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Agustus 2021



Kepala BPPSI

Fathullah
Fathullah

**LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN JULI 2021**

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian (*Whistle Blowing System*).

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** **tidak terdapat aduan** mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan Tindakan lain yang sejenis.

Selama Bulan **Juli** Tahun **2021**, pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru telah menerima aduan sebanyak **0 aduan**.

Demikian laporan *Whistle Blowing System (WBS)* pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Juli Tahun 2021. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Agustus 2021



Kepala BPPSI

Fathullah

**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN JULI 2021**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** terdapat sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui **Website, Telepon, Kotak Saran dan Formulir Pengaduan Masyarakat**.

Selama Bulan **Juli Tahun 2021**, sebanyak **0 pengaduan** masyarakat telah masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut diatas. Sebanyak **0 pengaduan** telah selesai ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyalahan Wewenang : **0 aduan**
2. Pelayanan Masyarakat : **0 aduan**
3. Indikasi KKN/Pungli : **0 aduan**
4. Kepegawaian : **0 aduan**
5. Tata Laksana/Regulasi : **0 aduan**
6. Pengaduan Lainnya : **0 aduan**

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Juli Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Agustus 2021


Kepala BPSI

Fathullah

**LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN JULI 2021**

Dalam rangka peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kami Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** melaporkan hal-hal terkait dengan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

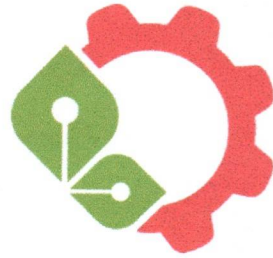
1. Selama Bulan **Juli Tahun 2021** Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** tidak terdapat aduan mengenai gratifikasi.
2. Pada Bulan **Juli Tahun 2021** tidak terdapat aduan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian laporan Pengendalian Gratifikasi yang terjadi pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Juli Tahun 2021. Laporan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi Pengendalian Gratifikasi dalam rangka implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Agustus 2021


Kepala BPPSI

Fathullah



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN AGUSTUS 2021**



**LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN AGUSTUS 2021**

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) serta peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada bulan **Agustus Tahun 2021** pada **Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** tidak terjadi Benturan Kepentingan pada Unit Kerja.

Demikian laporan Benturan Kepentingan pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru pada Bulan Agustus Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, September 2021

Kepala BPSI

Fathullah



**LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN AGUSTUS 2021**

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian (*Whistle Blowing System*).

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** **tidak terdapat aduan** mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan Tindakan lain yang sejenis.

Selama Bulan **Agustus** Tahun **2021**, pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru telah menerima aduan sebanyak **0 aduan**.

Demikian laporan *Whistle Blowing System (WBS)* pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Agustus Tahun 2021. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, September 2021

Kepala BPSI

Fathullah



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN AGUSTUS 2021**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** terdapat sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui **Website, Telepon, Kotak Saran dan Formulir Pengaduan Masyarakat**.

Selama Bulan **Agustus** Tahun **2021**, sebanyak **0 pengaduan** masyarakat telah masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut diatas. Sebanyak **0 pengaduan** telah selesai ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyalahan Wewenang : **0 aduan**
2. Pelayanan Masyarakat : **0 aduan**
3. Indikasi KKN/Pungli : **0 aduan**
4. Kepegawaian : **0 aduan**
5. Tata Laksana/Regulasi : **0 aduan**
6. Pengaduan Lainnya : **0 aduan**

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Agustus Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, September 2021

Kepala BPSI

Fathullah



**LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN AGUSTUS 2021**

Dalam rangka peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kami Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** melaporkan hal-hal terkait dengan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. Selama Bulan **Agustus** Tahun **2021** Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** tidak terdapat aduan mengenai gratifikasi.
2. Pada Bulan **Agustus** Tahun **2021** tidak terdapat aduan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian laporan Pengendalian Gratifikasi yang terjadi pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Agustus Tahun 2021. Laporan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi Pengendalian Gratifikasi dalam rangka implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, September 2021





**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN SEPTEMBER 2021**



**LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN SEPTEMBER 2021**

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) serta peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada bulan **September Tahun 2021** pada **Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak terjadi** Benturan Kepentingan pada Unit Kerja.

Demikian laporan Benturan Kepentingan pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru pada Bulan September Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Oktober 2021

Kepala BRPSI

Fathullah



**LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN SEPTEMBER 2021**

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian (*Whistle Blowing System*).

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** tidak terdapat aduan mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan Tindakan lain yang sejenis.

Selama Bulan **September** Tahun **2021**, pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru telah menerima aduan sebanyak **0 aduan**.

Demikian laporan *Whistle Blowing System (WBS)* pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan September Tahun 2021. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Oktober 2021



Kepala BPPSI
Fathullah
Fathullah

**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN SEPTEMBER 2021**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** terdapat sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui **Website, Telepon, Kotak Saran dan Formulir Pengaduan Masyarakat**.

Selama Bulan **September Tahun 2021**, sebanyak **0 pengaduan** masyarakat telah masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut diatas. Sebanyak **0 pengaduan** telah selesai ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyalahan Wewenang : **0 aduan**
2. Pelayanan Masyarakat : **0 aduan**
3. Indikasi KKN/Pungli : **0 aduan**
4. Kepegawaian : **0 aduan**
5. Tata Laksana/Regulasi : **0 aduan**
6. Pengaduan Lainnya : **0 aduan**

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan September Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Oktober 2021


Kepala BPPSI

Fathullah

**LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN SEPTEMBER 2021**

Dalam rangka peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kami Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** melaporkan hal-hal terkait dengan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. Selama Bulan **September Tahun 2021** Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** tidak terdapat aduan mengenai gratifikasi.
2. Pada Bulan **September Tahun 2021** tidak terdapat aduan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

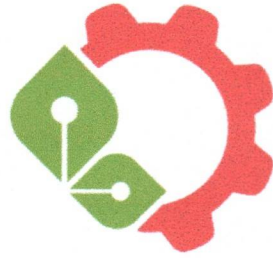
Demikian laporan Pengendalian Gratifikasi yang terjadi pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan September Tahun 2021. Laporan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi Pengendalian Gratifikasi dalam rangka implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Oktober 2021



Kepala BRPSI

Fathullah
Fathullah



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN OKTOBER 2021**



**LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN OKTOBER 2021**

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) serta peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada bulan **Oktober** Tahun **2021** pada **Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** tidak terjadi Benturan Kepentingan pada Unit Kerja.

Demikian laporan Benturan Kepentingan pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru pada Bulan Oktober Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, November 2021

Kepala BPPSI

Fathullah



**LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN OKTOBER 2021**

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian (*Whistle Blowing System*).

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** **tidak terdapat aduan** mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan Tindakan lain yang sejenis.

Selama Bulan **Oktober** Tahun **2021**, pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru telah menerima aduan sebanyak **0 aduan**.

Demikian laporan *Whistle Blowing System (WBS)* pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Oktober Tahun 2021. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, November 2021

Kepala BPPSI

Fathullah



**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN OKTOBER 2021**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** terdapat sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui **Website, Telepon, Kotak Saran dan Formulir Pengaduan Masyarakat**.

Selama Bulan **Oktober** Tahun **2021**, sebanyak **0 pengaduan** masyarakat telah masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut diatas. Sebanyak **0 pengaduan** telah selesai ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyalahan Wewenang : **0 aduan**
2. Pelayanan Masyarakat : **0 aduan**
3. Indikasi KKN/Pungli : **0 aduan**
4. Kepegawaian : **0 aduan**
5. Tata Laksana/Regulasi : **0 aduan**
6. Pengaduan Lainnya : **0 aduan**

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Oktober Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, November 2021

Kepala BPPSI

Fathullah



**LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN OKTOBER 2021**

Dalam rangka peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kami Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** melaporkan hal-hal terkait dengan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. Selama Bulan **Oktober** Tahun **2021** Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** tidak terdapat aduan mengenai gratifikasi.
2. Pada Bulan **Oktober** Tahun **2021** tidak terdapat aduan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian laporan Pengendalian Gratifikasi yang terjadi pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Oktober Tahun 2021. Laporan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi Pengendalian Gratifikasi dalam rangka implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, November 2021

Kepala BPSI

Fathullah





**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN NOVEMBER 2021**



**LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN NOVEMBER 2021**

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) serta peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada bulan **November** Tahun **2021** pada **Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru tidak terjadi** Benturan Kepentingan pada Unit Kerja.

Demikian laporan Benturan Kepentingan pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru pada Bulan November Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Desember 2021



Kepala BPPSI
[Signature]
Fathullah

**LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN NOVEMBER 2021**

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian (*Whistle Blowing System*).

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** **tidak terdapat aduan** mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan Tindakan lain yang sejenis.

Selama Bulan **November** Tahun **2021**, pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru telah menerima aduan sebanyak **0 aduan**.

Demikian laporan *Whistle Blowing System (WBS)* pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan November Tahun 2021. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Desember 2021



Kepala BPPSI
[Signature]
Fathullah

**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN NOVEMBER 2021**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** terdapat sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui **Website, Telepon, Kotak Saran** dan **Formulir Pengaduan Masyarakat**.

Selama Bulan **November** Tahun **2021**, sebanyak **0 pengaduan** masyarakat telah masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut diatas. Sebanyak **0 pengaduan** telah selesai ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyalahan Wewenang : **0 aduan**
2. Pelayanan Masyarakat : **0 aduan**
3. Indikasi KKN/Pungli : **0 aduan**
4. Kepegawaian : **0 aduan**
5. Tata Laksana/Regulasi : **0 aduan**
6. Pengaduan Lainnya : **0 aduan**

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan November Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Desember 2021



Kepala BPPSI
Fathullah
Fathullah

**LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN NOVEMBER 2021**

Dalam rangka peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kami Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** melaporkan hal-hal terkait dengan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. Selama Bulan **November** Tahun **2021** Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** **tidak terdapat aduan** mengenai gratifikasi.
2. Pada Bulan **November** Tahun **2021** **tidak terdapat aduan** yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian laporan Pengendalian Gratifikasi yang terjadi pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan November Tahun 2021. Laporan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi Pengendalian Gratifikasi dalam rangka implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Desember 2021



Kepala BPPSI

Fathullah



**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI
PELAKSANAAN KEGIATAN
PENGAWASAN**

**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN
STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

**KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
PERIODE BULAN DESEMBER 2021**



**LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN DESEMBER 2021**

Dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good government*) serta peningkatan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di lingkungan Kementerian Perindustrian. Dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu dilakukan pencegahan dan penanganan terhadap terjadinya Benturan Kepentingan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pada bulan **Desember** Tahun **2021** pada **Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** tidak terjadi Benturan Kepentingan pada Unit Kerja.

Demikian laporan Benturan Kepentingan pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru pada Bulan Desember Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi pencegahan terjadinya Benturan Kepentingan dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Januari 2022

Kepala BPSI

Fathullah



**LAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN DESEMBER 2021**

Dalam rangka implementasi Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi serta mendorong peran serta pejabat/pegawai di Lingkungan Kementerian Perindustrian dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Mengacu kepada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pelaporan Pelanggaran di Lingkungan Kementerian Perindustrian (*Whistle Blowing System*).

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** **tidak terdapat aduan** mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, kode etik, kebijakan, dan Tindakan lain yang sejenis.

Selama Bulan **Desember** Tahun **2021**, pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru telah menerima aduan sebanyak **0 aduan**.

Demikian laporan *Whistle Blowing System (WBS)* pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Desember Tahun 2021. Laporan ini sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Januari 2022



Kepala BRPSI
Fathullah
Fathullah

**LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN DESEMBER 2021**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Pelayanan Publik dan mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 29 Tahun 2013 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Perindustrian, maka sebagai penyelenggara Pelayanan Publik wajib untuk menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan Pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan. Hal tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan yang berkualitas, wajar dan adil.

Pada Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** terdapat sarana pengaduan yang disediakan dalam rangka menampung keluhan, ketidakpuasan, pelayanan informasi dan/atau aspirasi seluruh masyarakat yang mendapatkan pelayanan, antara lain melalui **Website, Telepon, Kotak Saran dan Formulir Pengaduan Masyarakat**.

Selama Bulan **Desember Tahun 2021**, sebanyak **0 pengaduan** masyarakat telah masuk melalui berbagai sarana pengaduan tersebut diatas. Sebanyak **0 pengaduan** telah selesai ditindaklanjuti.

Dari jumlah tersebut, ruang lingkup permasalahan yang diadukan dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan Wewenang : **0 aduan**
2. Pelayanan Masyarakat : **0 aduan**
3. Indikasi KKN/Pungli : **0 aduan**
4. Kepegawaian : **0 aduan**
5. Tata Laksana/Regulasi : **0 aduan**
6. Pengaduan Lainnya : **0 aduan**

Demikian laporan penanganan Pengaduan Masyarakat pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Desember Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dalam rangka Implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) serta peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat.

Pekanbaru, Januari 2022

Kepala BPSI

Fathullah



**LAPORAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PEKANBARU
BULAN DESEMBER 2021**

Dalam rangka peningkatan Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta mencegah terjadinya praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Kementerian Perindustrian. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Perindustrian.

Kami Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** melaporkan hal-hal terkait dengan Pengendalian Gratifikasi sebagai berikut:

1. Selama Bulan **Desember** Tahun **2021** Satker **Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru** tidak terdapat aduan mengenai gratifikasi.
2. Pada Bulan **Desember** Tahun **2021** tidak terdapat aduan yang disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Demikian laporan Pengendalian Gratifikasi yang terjadi pada Satker Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru selama Bulan Desember Tahun 2021. Laporan ini dibuat untuk menjadi bahan evaluasi Pengendalian Gratifikasi dalam rangka implementasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kementerian Perindustrian.

Pekanbaru, Januari 2022

Kepala BPSI

Fathullah

